

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- A. Zainal Farid. (2018). *Hukum Pidana 1*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Adi Setiawan & Pramudya Mulyono Muslim. (2021). *Interkoreksi Proses Bisnis Perbendaharaan pada Bendahara Umum Negara dengan Satuan Kerja Selaku Kuasa Pengguna Anggaran*. Jakarta: Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan Kementerian Keuangan.
- Amir Ilyas. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (disertai teori-teori pengantar dan beberapa komentar)*. Yogyakarta: Rangka Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia.
- Amir Ilyas & Muh. Nursal N.S. (2022). *Kumpulan Asas Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Erdianto Effenndi. (2011). *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditama.
- Hartono. (2010). *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hilman Hadikusuma. (2018). *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Ishaq. (2018). *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*. Depok: Rajagrafindo Persada.
- Ismu Gunadi & Jonaedi Efendi. (2019). *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Jonaedi Efendi. (2018). *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*. Depok: Prenadamedia Group.
- M. Yahya Harahap. (2010). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding,, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. (2014). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Pranadamedia Group.

- R. Soesilo. (1995). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Poilitea.
- M. Said Karim dan Haeranah. (2016). *Delik-Delik di Dalam Kodifikasi*. Makassar: Pustaka Pena Press.
- Solikin & Suseno. (2002). *Uang: Pengertian, Penciptaan, dan Peranannya dalam Perekonomian*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studikebanksentralan (PPSK) BANK INDONESIA.
- Tri Rama K. (2012). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Mitra Pelajar.
- Wirjono Prodjodikoro. (2014). *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia Edisi Ketiga*. Bandung: Refika Aditama.
- Zaeni Asyhadie & Arief Rahman. (2018). *Pengantar Ilmu Hukum*. Depok: Rajagrafindo Persada.

Jurnal:

- Afida Ainur Rofka. (2022). Penyelesaian Sengketa Sistem Pembayaran Cash on Delivery pada Media E-Commerce. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 162.
- Alensi Kusuma Dewi, M. Said Karim, & Audyna Mayasari Muin. (2023). Urgensi *Contempt of Court* dalam Sistem Peradilan Pidana: Studi Perbandingan Hukum. *Amanna Gappa*, 37.
- Devi Neng Hartanti, Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu, & Iqbal Taufik. (2021). Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Uang Cash on Delivery dalam Putusan Pengadilan Nomor: 139/Pid.B/2020/PN.Amb . *TATOHI Jurnal Ilmu Hukum*, 111.
- Febronia Juniati Sanjaya & Krisnadi Nasution. (2023). Upaya Perlindungan Hukum Bagi Kurir Mitra Kerja dalam Proses Layanan Cash on Delivery (COD). *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Pilitical Governance*, 454.
- I Wayan Gde Wiryawan. (2021). Urgensi Perlindungan Kurir dalam E-Commerce dengan Sistem (Cash on Delivery). *Jurnal Analisis Hukum (JAH)*, 192.
- Josef M Monteiro. (2007). Putusan Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum Pro Justisia*, 133-134.

- Nabil Abduh Aqil, Chelsea Mutiara Putri, & Dinda Yunisa. (2022). Evaluasi Sistem Cash on Delivery Demi Meningkatkan Kepastian Hukum dalam Perkembangan Transaksi Elektronik di Indonesia. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 253.
- Muh. Arman, M Syukri Akub, & Wiwie Heryani. (2018). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyebaran Berita Hoaks Melalui Media Online. *Amanna Gappa*, 2.
- Rachmat Bin Badani Tempo, Irsyad Rafi, & Alya Namirah. (2022). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Biaya Penanganan dalam Transaksi Cash on Delivery pada Marketplace Shopee. *Al-Khiyar Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam*, 220.
- Sri Rusmiati & Budi Priyono. (2021). Evaluasi Pertanggungjawaban Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran pada Kantor Ditjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Jakarta. *Journal of Business Administration Economic & Entrepreneurship*, 77.
- Syariifi Ade Pramana. (2016). Kantor Ekspedisi Pengiriman Barang. *Jurnal Online Mahasiswa Arsitektur*, 129.
- Tessalonika Novela Pangaila. (2016). Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Umum. *Lex Privatum*, 7.

Skripsi:

- Amri Albadru Lopa. (2019). *Analisis Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Oleh Kasir dan Petugas Administrasi CV. Rajawali Mas Perkasa Dalam Perkara No.49/Pid.B/2016/PN.Pbr*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru.
- Rhostyna. (2021). *Tinjauan Yuridis Tindak Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Oleh Pegawai Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah (Studi Kasus Putusan Nomor: 132/Pid.B/2019/PN.Bbs)*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum
Acara Pidana.

Putusan:

Putusan Nomor 233/Pid.B/2020/PN.Prg.

Media Online:

Fadly T. Pamungkas. (2023, Januari 26). *Hukum Online*. Retrieved from
Justika by Hukum Online: <https://blog.justika.com/pidana-dan-laporan-polisi/pasal-penggelapan-uang/> (diakses pada pukul 16:11
WITA).

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2023, Februari 6). *Ekspedisi*.
Diambil kembali dari KBBI Daring:
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/ekspedisi> (diakses pada pukul
15:37 WITA).

Kholida Qothrunnada. (2023, Januari 24). *Detik Finance*. Retrieved from
Detik Finance: <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5971563/cash-on-delivery-cod-pengertian-cara-kerja-dan-tipsnya>
(diakses pada pukul 23:03 WITA).